



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PSI Tolak Balapan Formula E

Ketua DPRD DKI Acuh

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bakal acuhkan penolakan yang dilayangkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu terkait penolakan penyelenggaraan Formula E di ibu kota pada 2020.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Fraksi PSI akan melunak jika Pemprov DKI Jakarta bisa menjelaskan manfaat dan keuntungan digelarnya ajang balap mobil berbasis energi listrik tersebut.

"Silakan (mau protes-red), kalau ada penjelasan positif pasti mereka akan ngerti," ujar dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI tak sembarangan membuat wacana pelaksanaan balap mobil kelas internasional itu.

Menurut dia, jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya sudah memikirkan secara matang untuk melaksanakan Formula E di Jakarta pada tahun depan.

"Ini bukan semena-mena (penyelenggaraan mobil balap Formula E di Jakarta-red)," tandas pria yang akrab disapa Pras itu.

Pras juga mengaku, telah bertemu dengan delegasi channel TV Fox Sports Asia guna membahas promosi untuk perhelatan Formula E, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 6 Juni 2020. Pertemuan berlangsung tertutup di ruangnya.

Ia juga menegaskan, DPRD fokus pembahasan terkait potensi pemasukan dari gelaran Formula E. Maka dari itu, diperlukan langkah promosi yang baik agar acara ini bisa mendorong iklim pariwisata di ibu kota.

"Ya dari Fox kan yang namanya event besar ini harus ada promote yang masyarakat tahu. Apa sih yang namanya Formula E? Nah, di penjelasan tadi bagus juga gitu lho. Jadi kita jangan Formula E-nya yang kita ini (promosikan saja), tapi bagaimana pariwisata kita target devisanya," beber dia.

"Nah, di sini Fox mau kerja sama dengan Pemda untuk mempromosikan, di mana spot-spot yang punya Pemda di sana dilihat (promosinya), dengan Bahasa Indonesia yang baik. Jadi ada masukan-masukan yang positif juga, jangan tiba-tiba ujug-ujug ada Formula E," sambung dia.

Pras berharap, Formula E dapat memikat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Jakarta. Sehingga bisa meningkatkan devisa.

"Ada aksi promosi ke seluruh dunia, bisa melihat bahwa Jakarta, Indonesia, itu baik dan pariwisatanya banyak. Ada makanan enak, ada pulau yang baik. Orang kan selama ini tahunya Bali, dia enggak tahu kalau Kepulauan Seribu ada ikan banyak, ada hiu banyak, ada penginapan baik," tutup Pras.

Sebelumnya, penyelenggaraan Formula E di Jakarta menuai pro dan kontra. Dengan dana Rp1,8 triliun yang digelontorkan Pemprov DKI dalam RAPBD DKI 2020, urgensi penyelenggaraan pun dipertanyakan.

Salah satu yang menentang adalah Fraksi PSI DPRD yang menilai anggaran Rp1,8 triliun terlalu besar dan tak layak masuk program prioritas, di saat pemerintah masih mengalami defisit anggaran.

"Fraksi PSI bukan anti-balapan, kami terus bekerja membalap ketertinggalan dalam perlombaan transparansi. Kami hanya menyayangkan, nilai anggaran untuk penyediaan air bersih, sanitasi, rehab gedung sekolah, GOR, justru dikalahkan oleh event balap mobil listrik seperti ini," ungkap Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak penyelenggaraan balap mobil Formula E dengan alasan APBD DKI mengalami defisit. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyatakan, pihaknya menolak pembiayaan Formula E oleh Pemrov DKI Jakarta.

Ketimbang menggunakan anggaran daerah, wakil ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan pelaksanaan Formula E ditanggung swasta. Ara sapaan Anggara menilai, pelaksanaan Formula E sejatinya bisa ditanggung pihak swasta ketimbang daerah.

Terlebih lagi, kata dia, alasan kuat penolakan pembiayaan Formula E melihat kondisi keuangan Jakarta yang defisit. "Kami PSI menolak Formula E, karena andai kata bisa swasta kenapa harus pakai uang rakyat?," ungkap dia kepada INDOPOS, Kamis (7/11/2019).

Sebagai anggota baru di legislatif, Ara mengatakan, pihaknya tak ingin gegabah menyepakati dan menandatangani persetujuan skema pembiayaan Formula E oleh keuangan daerah. Untuk itu, ia sekali lagi meminta Pemprov menyerahkan kajian analisa investasi atas penyelenggaraan Formula E. "Kami minta dengan sangat kajian analisisnya, kalau belum ada lebih baik dibatalkan karena DKI sudah menganggarkan komitmen fee sekitar Rp360 miliar," tandas dia.

Selain belum melihat kajian analisa investasi terhadap, Ara juga mengkritisi tolak ukur dampak penyelenggaraan Formula E. Terlebih lagi tidak ada atlet turut serta dalam kontestasi tersebut. Dia juga mempertanyakan hajatan seperti ini tidak masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Program Formula E tidak pernah muncul di RPJMD kenapa ngotot untuk program ini. Keuangan kita sedang defisit, kita tidak punya atlet Formula E terus siapa yang kita support," tutur dia.

Agar pembiayaan ini tak disahkan, Ara menambahkan, pihaknya akan membangun komunikasi dengan antar fraksi. "Kami akan menjalin komunikasi dengan anggota dewan lain menyamakan visi misi," imbuh dia.

Ditambahkan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta lainnya, Anthony Winza Prabowo. PSI secara tegas mendesak Pemprov untuk membatalkan event yang digelar 2020 itu. Di

mengatakan, anggaran tengah dalam keadaan defisit, sehingga lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting.

Apalagi dana yang digunakan oleh dalam pembuatan event tahunan itu mencapai Rp1 triliun yang hanya berpusat dalam satu kawasan saja. "Saya pikir lebih bijak menganggarkan prioritas-prioritas kebutuhan masyarakat yang lebih penting. Contohnya dengan menggunakan anggaran untuk merehab gedung sekolah," kata Anthony.

Menurut Anthony, jika Pemrov DKI ingin mengedepankan Formula E sebagai bentuk mendorong penggunaan mobil listrik, seharusnya dapat menggunakan cara-cara lain yang lebih bijak, bukan dengan membuat event-event internasional seperti Formula E. "Misalnya kita kedepankan infrastruktur penunjang mobil listrik. Misalnya membangun charging mobil listrik, itu bisa ribuan lebih dengan dana triliunan, atau kita beli bus listrik, jika tujuannya ke sana," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, event ini juga tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan list program percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah. Sehingga tentunya hal itu menjadi pertanyaan, kenapa event Formula E masuk prioritas gubernur DKI. "Kalo misalnya mau gaya-gaya di Internasional biar kelihatan kaya bisa menyelenggarakan ini, padahal di dalamnya kita ini miskin, masih kurang uang, apakah ini pantas," kata dia. (aen)